

Strategi Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Penyediaan Informasi Akademik Berbasis Teknologi Informasi sebagai Sarana Pendidikan Politik

Ketut Ayu Sanjiwani

Univeristas Udayana, Indonesia
E-mail: ayusanjiwani@unud.ac.id

Article History:

Received: 30 Maret 2026

Revised: 07 April 2026

Accepted: 09 April 2026

Keywords: *Perpustakaan Perguruan Tinggi, Informasi Akademik, Teknologi Informasi, Pendidikan Politik.*

Abstract: *Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap peran perpustakaan perguruan tinggi dalam menyediakan informasi akademik. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat sumber belajar, tetapi juga berperan sebagai sarana pendidikan politik melalui penyediaan informasi yang objektif, akurat, dan berbasis keilmuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perpustakaan perguruan tinggi dalam penyediaan informasi akademik berbasis teknologi informasi sebagai sarana pendidikan politik bagi sivitas akademika. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap berbagai literatur ilmiah, regulasi perundang-undangan, dan dokumen kebijakan terkait perpustakaan, teknologi informasi, dan keterbukaan informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perpustakaan meliputi pengembangan koleksi digital, pemanfaatan sistem otomasi perpustakaan, penyediaan repository institusi, peningkatan literasi informasi, serta penguatan kompetensi pustakawan di bidang teknologi informasi. Strategi tersebut tidak hanya meningkatkan akses dan kualitas informasi akademik, tetapi juga mendukung pendidikan politik melalui pemahaman kebijakan publik, hukum, dan sistem kenegaraan secara akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengelola perpustakaan perguruan tinggi dalam mengembangkan layanan informasi yang berorientasi pada pendidikan politik di lingkungan akademik.*

PENDAHULUAN

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, perpustakaan tidak lagi berfungsi secara konvensional sebagai tempat penyimpanan koleksi cetak, melainkan telah berkembang menjadi pusat pengelolaan dan diseminasi informasi akademik berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan perpustakaan menyediakan berbagai sumber informasi digital,

seperti e-book, e-journal, database ilmiah, dan repository institusi. Kondisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Di sisi lain, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam membentuk sivitas akademika yang memiliki pemahaman politik yang baik, kritis, dan bertanggung jawab. Pendidikan politik dalam konteks akademik tidak dimaknai sebagai politik praktis, melainkan sebagai proses pembelajaran untuk memahami sistem politik, kebijakan publik, hukum, dan nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks ini, perpustakaan perguruan tinggi berperan strategis sebagai sarana pendidikan politik melalui penyediaan informasi akademik yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Oleh karena itu, strategi perpustakaan perguruan tinggi dalam penyediaan informasi akademik berbasis teknologi informasi menjadi penting untuk dikaji, khususnya dalam kaitannya dengan peran perpustakaan sebagai sarana pendidikan politik di lingkungan akademik. Dalam konteks pendidikan tinggi, penyediaan informasi akademik juga memiliki dimensi pendidikan politik, khususnya dalam membentuk pemahaman sivitas akademika terhadap kebijakan publik, sistem pemerintahan, hukum, dan nilai-nilai demokrasi. Perpustakaan perguruan tinggi, melalui pemanfaatan teknologi informasi, berperan sebagai sarana pendidikan politik yang netral dan berbasis keilmuan dengan menyediakan akses terhadap sumber informasi resmi, ilmiah, dan terpercaya. Oleh karena itu, strategi perpustakaan dalam penyediaan informasi akademik berbasis teknologi informasi menjadi relevan untuk dikaji dalam perspektif pendidikan politik. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan dan penyediaan informasi di perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyedia koleksi cetak, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat sumber belajar digital yang menyediakan akses cepat, luas, dan terbuka terhadap berbagai informasi akademik. Transformasi ini menuntut perpustakaan perguruan tinggi untuk merumuskan strategi yang adaptif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi informasi guna memenuhi kebutuhan sivitas akademika. Dalam konteks perguruan tinggi, informasi akademik yang disediakan oleh perpustakaan tidak hanya berperan dalam mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian, tetapi juga memiliki potensi strategis sebagai sarana pendidikan politik. Melalui akses terhadap jurnal ilmiah, buku digital, repository institusi, basis data kebijakan publik, serta sumber informasi terkait demokrasi, konstitusi, dan kebijakan negara, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman kritis mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, perpustakaan berperan sebagai wahana pembentukan kesadaran politik yang rasional, kritis, dan bertanggung jawab.

Pendidikan politik di perguruan tinggi menjadi semakin penting di tengah tantangan era digital, seperti maraknya disinformasi, hoaks politik, dan rendahnya literasi politik generasi muda. Perpustakaan perguruan tinggi, melalui strategi penyediaan informasi akademik berbasis teknologi informasi, dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi informasi dan literasi politik mahasiswa. Pemanfaatan layanan digital, seperti e-library, database daring, dan platform pembelajaran terintegrasi, memungkinkan mahasiswa untuk mengakses sumber informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi perpustakaan perguruan tinggi yang terencana dan berkelanjutan dalam pengelolaan serta penyediaan informasi akademik berbasis teknologi informasi agar dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana pendidikan politik. Strategi tersebut mencakup pengembangan koleksi digital, peningkatan kompetensi pustakawan, integrasi layanan perpustakaan dengan kurikulum, serta penguatan peran perpustakaan dalam mendukung pembelajaran kewarganegaraan dan demokrasi di lingkungan

perguruan tinggi. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam pengelolaan dan penyediaan informasi di perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan tidak lagi berfungsi semata sebagai penyedia koleksi cetak, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat sumber informasi digital yang mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Transformasi tersebut menuntut perpustakaan perguruan tinggi untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menyediakan informasi akademik berbasis teknologi informasi secara efektif dan berkelanjutan. Informasi akademik yang dikelola oleh perpustakaan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir kritis mahasiswa, termasuk dalam aspek pemahaman politik dan kewarganegaraan. Akses terhadap sumber ilmiah yang berkaitan dengan demokrasi, kebijakan publik, hukum, dan ketatanegaraan memungkinkan mahasiswa memperoleh pengetahuan yang objektif dan berbasis data. Dengan demikian, perpustakaan dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan politik yang mendukung pengembangan kesadaran politik mahasiswa secara rasional dan bertanggung jawab.

Di tengah meningkatnya arus informasi digital, mahasiswa dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti disinformasi dan rendahnya literasi politik. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran perpustakaan dalam menyediakan sumber informasi akademik yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, seperti koleksi digital, basis data daring, dan repositori institusi, perpustakaan perguruan tinggi dapat meningkatkan literasi informasi sekaligus memperkuat fungsi edukatifnya dalam konteks pendidikan politik. Namun demikian, optimalisasi peran perpustakaan sebagai sarana pendidikan politik memerlukan strategi yang terencana dan sistematis. Strategi tersebut meliputi pengembangan koleksi akademik berbasis digital, peningkatan kompetensi pustakawan, serta integrasi layanan perpustakaan dengan kebutuhan pembelajaran di perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi perpustakaan perguruan tinggi dalam penyediaan informasi akademik berbasis teknologi informasi sebagai sarana pendidikan politik.

LANDASAN TEORI

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan perguruan tinggi adalah unit pelaksana teknis yang berfungsi menunjang kegiatan akademik di perguruan tinggi. Menurut Sulisty-Basuki, perpustakaan perguruan tinggi berperan sebagai pusat sumber belajar dan pusat informasi ilmiah bagi sivitas akademika.

Informasi Akademik

Informasi akademik merupakan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan penelitian, seperti buku teks, jurnal ilmiah, karya ilmiah mahasiswa, dan hasil penelitian dosen. Informasi akademik yang berkualitas harus memenuhi unsur relevansi, keakuratan, kemutakhiran, dan keandalan.

Teknologi Informasi dalam Perpustakaan

Teknologi informasi dalam perpustakaan mencakup penggunaan sistem otomatisasi, katalog daring (OPAC), layanan e-resources, dan repositori digital. Pemanfaatan teknologi informasi bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan serta memperluas akses informasi bagi pengguna.

Pendidikan Politik dalam Lingkungan Akademik

Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman individu mengenai sistem politik, kebijakan publik, hukum, dan hak serta kewajiban warga negara.

Dalam lingkungan akademik, pendidikan politik dilakukan secara ilmiah, kritis, dan netral melalui pemanfaatan sumber informasi yang valid dan terpercaya. Pendidikan Politik dalam Lingkungan Akademik, pendidikan politik tidak bersifat indoktrinatif, melainkan dikembangkan melalui pendekatan ilmiah, kritis, dan berbasis data.

Perpustakaan perguruan tinggi berperan sebagai sarana pendidikan politik dengan menyediakan informasi akademik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, jurnal ilmu politik, serta publikasi lembaga negara. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan akses yang lebih luas dan cepat terhadap sumber-sumber tersebut, sehingga mendukung penguatan literasi politik sivitas akademika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji dan menginterpretasikan berbagai sumber untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Koleksi Digital

Pengembangan koleksi digital merupakan strategi utama perpustakaan perguruan tinggi dalam menyediakan informasi akademik. Koleksi digital memudahkan akses terhadap sumber informasi ilmiah, termasuk jurnal ilmu politik, hukum, dan kebijakan publik.

Pemanfaatan Sistem Otomasi Perpustakaan

Sistem otomasi perpustakaan mendukung pengelolaan koleksi dan layanan informasi secara efisien. Melalui OPAC dan layanan daring, pengguna dapat menelusur informasi akademik secara mandiri.

Penyediaan Repository Institusi

Repository institusi berfungsi sebagai sarana penyimpanan dan penyebaran karya ilmiah sivitas akademika. Repository juga berperan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas informasi akademik.

Peningkatan Literasi Informasi

Literasi informasi merupakan kemampuan pengguna dalam mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara efektif. Program literasi informasi yang diselenggarakan perpustakaan berkontribusi dalam pendidikan politik melalui pemahaman informasi kebijakan dan regulasi secara kritis.

Perpustakaan Sebagai Sarana Pendidikan Politik

Melalui penyediaan informasi akademik berbasis teknologi informasi, perpustakaan perguruan tinggi berperan sebagai sarana pendidikan politik yang netral. Perpustakaan menyediakan akses terhadap peraturan perundang-undangan, publikasi lembaga negara, serta kajian ilmiah tentang sistem politik dan demokrasi.

Tantangan Penyediaan Informasi Akademik

Tantangan yang dihadapi perpustakaan meliputi keterbatasan anggaran, infrastruktur teknologi, kompetensi pustakawan, dan literasi informasi pengguna. Tantangan ini memerlukan strategi penguatan kebijakan dan sumber daya perpustakaan.

Perpustakaan Perguruan Tinggi Sebagai Sarana Pendidikan Politik

Strategi penyediaan informasi akademik berbasis teknologi informasi di perpustakaan perguruan tinggi memiliki kontribusi penting dalam pendidikan politik sivitas akademika. Akses terhadap database kebijakan publik, jurnal ilmu politik, repository institusi, serta dokumen hukum nasional memungkinkan mahasiswa dan dosen memahami dinamika politik dan ketatanegaraan secara akademis dan objektif.

Perpustakaan tidak berperan sebagai pelaku politik praktis, melainkan sebagai fasilitator informasi yang mendukung penguatan kesadaran politik berbasis literasi informasi. Peran ini sejalan dengan prinsip netralitas perpustakaan dan kebebasan akademik dalam perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Perpustakaan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam penyediaan informasi akademik berbasis teknologi informasi sebagai sarana pendidikan politik. Strategi yang diterapkan meliputi pengembangan koleksi digital, sistem otomatisasi, repository institusi, literasi informasi, dan peningkatan kompetensi pustakawan.

Strategi tersebut mendukung peningkatan kualitas layanan informasi sekaligus penguatan pendidikan politik di lingkungan akademik. Selain mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian, strategi perpustakaan perguruan tinggi dalam penyediaan informasi akademik berbasis teknologi informasi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik yang berorientasi pada peningkatan literasi, kesadaran, dan pemahaman sivitas akademika terhadap kebijakan publik dan sistem kenegaraan.

Perpustakaan perguruan tinggi disarankan untuk terus mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi serta memperkuat perannya sebagai sarana pendidikan politik yang objektif dan berbasis keilmuan.

DAFTAR REFERENSI

- Basuki, S. (2010). *Pengantar ilmu perpustakaan*. Jakarta: Gramedia.
- International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). (2015). *Guidelines on information literacy*. The Hague: IFLA.
- Pendit, P. L. (2008). *Perpustakaan digital*. Jakarta: Sagung Seto.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Sutarno, N. S. (2006). *Manajemen perpustakaan*. Jakarta: Sagung Seto.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2019). *Media and information literacy for civic participation*. Paris: UNESCO.
- Yusuf, P. M. (2013). *Ilmu informasi, komunikasi, dan kepustakaan*. Jakarta: Bumi Aksara.